ANALISIS EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama X Tahun 2012-206)

Ati Kusmiati – 21113173

Pembimbing

Arni Purwanti, SE., M.M

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Uiversitas Komputer Indonesia
2017
Email: atik.k0523@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena yang terdapat dalam penelitian ini adalah tidak tercapainya target pemeriksaan pajak, penagihan pajak dengan surat teguran dan penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efektivitas pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama X.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa observasi dan dokumentasi. Metode pengolahan data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dengan surat teguran berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Variabel yang mempunyai pengaruh terdekat secara parsial terhadap peneriman pajak adalah penagihan pajak dengan surat teguran dengan nilai beta yang paling besar diantara variabel independen lainnya sebesar 1,014.

Kata Kunci : Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, dan Penerimaan pajak

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara (Diana Sari, 2013:40). Dana yang diperoleh dari rakyat dalam bentuk pajak digunakan untuk memenuhi biaya atas fungsi-fungsi yang harus dilakukan pemerintah tersebut (Siti Kurnia Rahayu, 2013:25). Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan (Diana Sari, 2013:40).

Menteri Keuangan Sri Mulyani (2016) menilai penerimaan pajak harus terus ditingkatkan. Menurut Suharso Manoarfa (2013) tingkat rasio penerimaan pajak selama ini tidak pernah menunjukkan peningkatan, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama X, realisasi penerimaan pajak mulai dari tahun 2012 sampai tahun 2016 tidak mencapai target.

Dari tabel 1.1 pada lampiran dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama X terus mengalami kenaikan. Akan tetapi realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target pada tahun 2012, 2013, 2015 dan 2016.

Menurut Diana Sari (2013:94) penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingati, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahu surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyandraan, menjual barang yang telah disita. Menurut Erly Suandi (2010 : 34), surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk mengatur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Menurut Fuad Rahmany (2012), sebagian besar orang terkaya di Indonesia sudah menjadi sasaran penagihan pajak selama ini. Masih ada puluhan juta oranng yang belum membayar pajak (Fuad Rahmany, 2012).

Menurut Agus Hendra Simatupang (2016), petugas pajak melakukan berbagai upaya untuk melakukan penagihan, namun yang bersangkutan tidak mau membayarkan tunggakan pajaknya. Pengejaran secara intensif harus dilakukan, terutama bagi wajib pajak yang nominalnya besar (Said Abdullah, 2016).

Dari tabel 1.2 pada lampiran dapat dilihat bahwa target penagihan pajak dengan surat teguran pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama X juga kerap tidak tercapai. Hal ini disebabkan karena banyaknya wajib pajak yang tidak mau untuk membayar pajak setelah diberikan surat teguran.

Pemeriksaan pajak (*Tax Audit*) merupakan salah satu hak yang dimiliki aparat pajak sesuai pasal 20 Undang - Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Richard Burton, 2001). Pemeriksaan pajak dilakukan oleh pemeriksa pajak yang telah memiliki tanda pengenal pemeriksa serta dilengkapi Surat Perintah Pemeriksaan yang harus diperlihatkan kepada wajib pajak yang akan diperiksa (Richard Burton, 2001).

Mulai Oktober 2016, seluruh pemeriksaan terhadap Wajib Pajak bermasalah yang tak ikut amnesti pajak akan dilanjutkan (M. Haniv, 2016). Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap target pajak bisa tercapai (M. Haniv, 2016). Strategi ini jangan dilihat menakutkan seolah-olah pemeriksa akan memeriksa setiap wajib pajak (Edi Slamet Irianto, 2016).

Kebanyakan wajib pajak enggan diperiksa (Edi Slamet Irianto, 2016). Padahal, bisa saja setelah pemeriksaan, malah ada temuan restitusi (Edi Slamet Irianto, 2016).

Dari tabel 1.3 pada lampiran dapat dilhat bahwa pada kantor Pelayanan Pajak Pratama X, masih banyak wajib pajak yang menghindari pemeriksaan pajak. Hal ini menyebabkan target pemeriksaan pajak tidak tercapai.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, judul penelitian ini adalah **Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak pada Kator Pelayanan Pajak Pratama X tahun 2012-2016.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang penelitian diatas, maka penulis mengidentifikasikan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan pajak tidak mencapai target.
2. Tidak tercapainya target pemeriksaan pajak.
3. Masih banyak wajib pajak yang tidak melunasi tunggakan pajak setelah diberi surat teguran menyebabkan penagihan pajak dengan surat teguran tidak tercapai.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh efektif pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kator Pelayanan Pajak Pratama X.
2. Seberapa besar pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak pada Kator Pelayanan Pajak Pratama X.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan penulis dalam menyusun usulan penelitian yaitu untuk menganalisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran terhadap Penerimaan Pajak pada Kator Pelayanan Pratama Pajak X.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh efektivitas pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kator Kator Pelayanan Pajak Pratama X.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak pada Kator Pelayanan Pajak Pratama X.

1.5 Kegunaan Akademis

Adapun kegunaan akademis dari informasi yang berhasil dikumpulkan selama penelitian, yaitu:

1. Bagi Peneliti
   Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan untuk menambah ilmu pengetahuan, dan juga memperoleh gambaran langsung tentang Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran terhadap Penerimaan Pajak pada Kator Pelayanan Pajak Pratama X.
2. Bagi Kator Pelayanan Pajak Pratama X
   Dengan Penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi instansi tentang Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran terhadap Penerimaan Pajak pada Kator Pelayanan Pajak Pratama X.
3. Bagi Peneliti Lain
   Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu mengenai Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran terhadap Penerimaan Pajak pada Kator Pelayanan Pajak Pratama X.

II. Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pajak

Dewasa ini sangatlah sulit untuk mengelompokkan perpajakan ke dalam salah satu kategori akademis yang tradisional (Diana Sari, 2013:23). Selain itu perpajakan merupakan disiplin ilmu yang dinamis, yang dapat berubah setiap saat, yang disesuaikan dengan amandemen yang dilakukan oleh yang berwenang untuk memenuhi suatu transaksi yang unik (Diana Sari, 2013:23).

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Diana Sari (2013:37), menyatakan bahwa pajak merupakan iuran masyarakat kepada Negara, dipungut berdasarkan undang-undang, pemungutan pajak dapat dipaksakan, tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontrapretaso perseorangan) yang dapat ditunjukan secara langsung karena diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan dan dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pajak merupakan kewajiban rakyat dengan menyerahkan sebagian kekayaan kepada kas negara yang dapat dipaksakan dan berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:25) menyatakan bahwa pajak memiliki dua macam fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulered*.

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa fungsi pajak adalah sebagai penerimaan negara dan untuk mengatur kebijakan-kebijakan yang ada agar perekonomian tetap stabil dan masyarakat tetap sejahtera.

2.1.1.3 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:42), menyatakan bahwa asas pemungutan pajak terbagi menjadi 3, yaitu :

1. Asas Domisili
   Pengenaan pajak didasarkan pada tempat tinggal (domisili) Wajib Pajak.
2. Asas Sumber
   Cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber dimana obyek pajak diperoleh.
3. Asas Kebangsaan
   Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan pengenaak pajak dengan kebangsaan dari suatu negara.

2.1.2 Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2009:134), menyatakan bahwa efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya.

Dari pengertian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa efektivitas adalah ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan. Untuk mengukur efektivitas, maka digunakan formula sebagai berikut pada tabel 2.1 pada lampiran.

2.1.3 Pemeriksaan Pajak

Menurut Diana Sari (2013:227), supaya hukum pajak bisa ditegakkan, setiap Surat Pemberitahuan yang telah dilaporkan Wajib Pajak ke KPP tempatnya terdaftar harus diteliti dan atau diperiksa aparat perpajakan.

2.1.3.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:245) menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak adalah hal pengawasan pelaksanaan sistem *self assessment* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada undang-undang perpajakan.

Dari definisi di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak untuk menghimpun data atau bukti lainnya untuk menguji kepatuhan wajib pajak atau untuk tujuan lain dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mengacu pada peraturan yang berlaku.

2.1.3.2 Tujuan Pemeriksaan

Menurut Diana Sari (2013:228), tujuan pemeriksaan pajak adalah :

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.3.3 Indikator-indikator Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:286) terdapat beberapa dimensi dan indikator pemeriksaan pajak diantaranya yaitu :

1. Persiapan pemeriksaan.
   Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan.
2. Pelaksanaan Pemeriksaan
   Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa.
3. Laporan Hasil Pemeriksaan
   a. Umum
   b. Pelaksanaan pemeriksaan
   c. Hasil pemeriksaan
   d. Kesimpulan dan usul pemeriksaan

Menurut Diana Sari (2013:236), indikator pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Umum
2. Pelaksanaan Pemeriksaan
3. Laporan Pemeriksaan Pajak

Diana Sari (2013:238) menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka akan diterbikan suatu surat ketetapan pajak, yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar,atau nihil.

Dari pernyataan di atas, maka dalam penelitian ini, indikator yang digunakan oleh peneliti adalah Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan atas dasar Laporan Hasil Pemeriksaan.

2.1.4 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

Penagihan Pajak merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan agar subjek pajak membayar hutang pajak dan biaya penagihan pajak. Sedangkan surat teguran merupakan surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk memperingatkan subjek pajak agar segera melunasi pajaknya.

2.1.4.1 Pengertian Penagihan Pajak

Menurut Diaz Priantara (2012 : 110), penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agara penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Dari pengertian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan dengan cara menegur, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

2.1.4.2 Indikator-Indikator Penagihan Pajak

Menurut Erly Suandi (2016:34) indikator penagihan pajak yaitu sebagai berikut :

a. Surat Teguran
b. Surat Paksa
c. Penyitaan
d. Lelang

Dari pernyataan di atas, maka dalam penelitian ini, indikator yang digunakan oleh peneliti adalah Surat Teguran dengan cara membandingkan antara jumlah nominal Surat Teguran yang terealisasikan dengan jumlah nominal target Surat Teguran.

2.1.4.3 Pengertian Surat Teguran

Menurut Rusjdi (2007:22), definisi Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk mengatur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

2.1.5 Penerimaan Pajak

2.1.5.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Menurut Amiruddin Idris (2016:50) penerimaan Pajak adalah adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

2.1.5.2 Indikator-Indikator Penerimaan Pajak

Indikator Penerimaan Pajak menurut Waluyo (2011:2) untuk dapat merealisasikan tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dibutuhkan dana yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari pajak.

Indikator yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sumber dana yang berasal dari pajak

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Efektivitas Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Siti Kurnia Rahayu (2013:247) menyatakan bahwa kegiatan pemeriksaan pajak yang dilakukan secara intensif terhadap wajib pajak yang terindikasi melaporkan SPT secara tidak benar sebagai bagian dari intensifikasi perpajak ian. Kegiatan pemeriksaan pajak ini dilakukan dengan produk hukumya berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebagai langkah untuk mencegah terjadinya kebocoran Negara khususnya dalam penerimaan pajak.

Kemudian masih menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:248) menyatakan bahwa tujuan kebijakan pemeriksaan Pajak secara tidak langsung menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Laura, dkk (2015) dan Agus Arianto Toly, dkk (2011) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak.

2.2.2 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran terhadap Penerimaan Pajak

Soemarso S.R (2007:13) menyakatakan bahwa, kewajiban pajak muncul pada sisi Wajib Pajak karena undang-undang. Kewajiban ini harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, undang-undang memberikan hak kepada negara untuk memaksa. Tindakan memaksa tercantum dalam pasal-pasal yang menyangkut penagihan. Tujuan dari dicantumkannya pasa-pasal penagihan adalah untuk memastikan bahwa penerimaan oleh pajak dapat dipenuhi.

Menurut Zakiah Syahab (2008) dan Diana Fitriani (2009), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

2.3 Hipotesis

Menurut Suharsimi Arikonto (2013:110), menyatakan bahwa hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara tehadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dapat diambil hipotesis penelitian, yaitu :

H1 : Menyimpulkan sementara efektivitas Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

H2 : Menyimpulkan sementara bahwa Penagihan Pajak dengan Surat Teguran berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

III. Metode Penelitian

3.1 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:2) pengertian metode penelitian adalah pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis.

Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid untuk mencapai tujuan tertentu. Metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

Menurut Sugiyono (2014:8) pengertian verifikatif diartikan sebagai penelitian yang dilakukan terhadap populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa metode desktiptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis suatu penelitian. Metode verifikatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis. Metode kuantitatif adalah metode berdasarkan data yang dapat dihitung untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Sugiyono (2014:38) mendefinisikan bahwa objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Dari pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa objek penelitian merupakan karakteristik tertetu yang berhubungan sesuai data yang digunakan.

Berdasarkan dengan latar belakang, dan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, maka yang menjadi objek pada penelitian ini adalah:

1. Efektifitas pemeriksaan pajak pada Kator Pelayanan Pajak X.
2. Penagihan pajak dengan surat teguran pada Kator Pelayanan Pajak X.
3. Penerimaan pajak pada Kator Pelayanan Pajak X.

3.2 Operasional Variabel

Menurut Suharsimi Arikunto (2013:161) menyatakan bahwa variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjasi titik perhatian suatu penelitian.

Untuk meneliti bagaimana Efektivitas Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran terhadap Penerimaan Pajak, penulis menentukan operasionalisasi variable sebagai berikut:

1. Variabel Independen (Variabel X)
   Variabel independen atau variabel bebas yaitu variable yang mempengaruhi variabel lain yang tidak bebas. Dalam penelitian terdapat 2 variabel independen yaitu efektivitas pemeriksaan pajak (X_1) dan penagihan pajak dengan surat teguran (X_2). Skala pengukuran variabel ini adalah skala rasio.
2. Variabel Dependen (Variabel Y)
   Variabel Independen atau variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas, maka yang menjadi variabel Y adalah penerimaan pajak. Skala pengukuran variabel ini adalah skala rasio.

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun pengertian data primer menurut Husein umar (2014:42) merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan sepert hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.

Data Sekunder menurut Ulber Silalahi (2015:433) adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.

Data Sekunder yang akan diambil pada Kator Pelayanan Pajak X antara lain sebagai berikut :

1. Data target dan realisasi pemeriksaan pajak pada tahun 2012 – 2016.
2. Data target dan realisasi penagihan pajak dengan surat teguran pada tahun 2012–2016.
3. Data target dan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2012 – 2016.

3.4 Populasi, Sampel dan Tempat serta Waktu Penelitian

3.4.1 Populasi

Definisi menurut Ulber Silalahi (2015:372) menjelaskan bahwa populasi adalah jumlah total dari seluruh unit atau elemen dimana penyelidik tertarik.

Dari definisi di atas maka penulis dapat disimpulkan bahwa populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang akan ditelit. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Surat Ketetapan Pajak, Surat Teguran, dan Laporan Penerimaan Pajak pada Kator Pelayanan Pajak X.

3.4.2 Sampel

Menurut Ulber Silalahi (2015:274) definisi sampel adalah satu subset atau sebagian elemen yang dipilih dengan cara tertentu dari populasi.

Berdasarkan definisi sampel di atas penulis menyimpulkan bahwa sampel adalah bagian dari populasi. Adapun yang menjadi sampel dari penelitian penulis adalah jumlah nominal Realisasi Surat Ketetapan Pajak, perbandingan jumlah Realisasi Pembayaran Surat Teguran dan perbandingan jumlah realisasi penerimaan pajakselama 5 tahun, yaitu dari tahun 2012 hingga tahun 2016 pada Kator Pelayanan Pajak X.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. Dalam hal ini pemilihan sampel bedasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai hubungan dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

3.4.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, maka penulis mengadakan penelitian di Kator Pelayanan Pajak X.

Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada Februari 2017 sampai dengan Agustus 2017.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan akurat, maka penulis menggunakan metode yaitu :

a. Studi Kepustakaan (*library research*) yaitu bentuk pengambilan data dengan cara membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
b. Studi lapangan
   Penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh objek penelitian yang meliputi:
   1. Metode Observasi atau Pengamatan
   2. Dokumentasi
      Dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan – bahan yang tertulis berupa data yang diperoleh dari perpustakaan maupun dari Kator Pelayanan Pajak X

3.6 Metode Pengujian Data

3.6.1 Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian mengenai ada tidaknya asumsi-asumsi klasik yang merupakan dasar dalam model regresi linear berganda. Hal ini dilakukan sebelum pengujian terhadap hipotesis. Pengujian asumsi klasik meliputi :

3.6.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian kebermaknaan (signifikansi) koefisien regresi. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik.

3.6.1.2 Uji Multikolinieritas

Menurut Husein Umar (2014:179) mendifinisikan uji multikolinieritas sebagai berikut multikolinieritas adalah untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen.

3.6.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Situasi heteroskedastisitas akan menyebabkan penaksiran koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien dan hasil taksiran dapat menjadi kurang atau melebihi dari yang semestinya. Dengan demikian, agar koefisien-koefisien regresi tidak menyesatkan, maka situasi heteroskedastisitas tersebut harus dihilangkan dari model regresi.

3.6.1.4 Uji Autokorelasi

Menurut Husein Umar (2014:182) mendefinisikan uji autokorelasi adalah dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat hubungan yang kuat baik positif maupun negatif antar data yang ada pada variabel-variabel penelitian".

3.6.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Pengertian Analisis Regresi Linear Berganda menurut Husein Umar (2014:126) menyatakan bahwa regresi Linear Berganda merupakan data pengamatan biasanya tidak hanya disebabkan oleh satu variabel melainkan oleh beberapa atau bahkan banyak variabel.

3.6.3 Analisis Korelasi

Analisis korelasi digunakan untuk mengukur kuat lemahnya hubungan antar variabel Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama X. Rumus dari korelasi berganda adalah:

3.6.4 Analisis Determinasi

Persentase peranan semua variabel bebas atas semua nilai variabel bebas ditunjukan oleh besarnya koefisien determinasi (R2). Semakin besar nilainya maka menunjukan bahwa persamaan regresi yang dihasilkan baik intuk mengestimasi variabel terikat.

3.6.5 Pengujian Hipotesis

Rancangan pengujian hipotesis ini dinilai dengan penetapan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, penelitian uji statistik dan perhitungan nilai uji statistik, perhitungan hipotesis, penetapan tingkat signifikan dan penarikan kesimpulan. Menurut Husein Umar (2014:104) menyatakan bahwa uji Hipotesis adalah suatu perumusan sementara mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu dan juga dapat menuntun atau mengarahkan penyelidikan selanjutnya.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Data dari penelitian ini diperoleh dari laporan hasil pemeriksaan, laporan penagihan pajak dengan surat teguran dan laporan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama X selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama X yang merupakan salah satu Kantor Pelayanan Pajak yang terdaftar pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, karena merupakan data yang dikumpulkan dan diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama X dan telah mengalami pengolahan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan berupa Surat Ketetapan Kurang Bayar, Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Penerimaan Pajak.

4.1.1.1 Gambaran Pemeriksaan Pajak pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur

Berdasarkan data Laporan Hasil Pemeriksaan berupa Surat Ketetapan Kurang Bayar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama X, pada tabel 4.1 pada lampiran dapat dilihat data pemeriksaan pajak pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

Berdasarkan tabel 4.1 pada lampiran, berikut ini merupakan target dan realisasi pemeriksaan pajak pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama X :

1. Dapat dilihat bahwa pemeriksaan pajak pada tahun 2012 mencapai target yaitu sebanyak 121,12%. Hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi pemeriksaan pajak pada tahun 2012 tergolong ke dalam kriteria sangat efektif
2. Selanjutnya pada tahun 2013 pemeriksaan pajak hanya 28,77%. Hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi pemeriksaan pajak pada tahun 2013 tergolong ke dalam kriteria tidak efektif.
3. Kemudian pada tahun 2014 pemeriksaan pajak hanya 87,47%. Hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi pemeriksaan pajak pada tahun 2014 tergolong ke dalam kriteria cukup efektif.
4. Berikutnya pada tahun 2015 pemeriksaan pajak hanya 25,23%. Hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi pemeriksaan pajak pada tahun 2015 tergolong ke dalam kriteria tidak efektif.
5. Pada tahun 2016 pemeriksaan pajak hanya 51,51%. Hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi pemeriksaan pajak pada tahun 2016 tergolong ke dalam kriteria kurang efektif.
6. Dari tabel 4.1 pada lampiran dapat dilihat bahwa target realisasi pemeriksaan pajak hanya pernah di capai pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp 9.139.153.458. Untuk tahun-tahun selanjutnya, pemeriksaan pajak yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama X tidak mencapai target.

4.1.1.2 Gambaran Penagihan Pajak dengan Surat Teguran pada Tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur

Berdasarkan tabel 4.3 pada lampiran, berikut ini merupakan gambaran realisasi penagihan pajak dengan surat teguran pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama X :

1. Pada tahun 2012 penagihan pajak dengan surat teguran hanya sebanyak 85,21% sedangkan pada tahun 2013 penagihan pajak dengan surat teguran hanya sebanyak 82,72%. Hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi penagihan pajak dengan surat teguran pada tahun 2012 dan 2013 tergolong ke dalam kriteria cukup efektif.
2. Kemudian pada tahun 2014 penagihan pajak dengan surat teguran sebanyak 143,61%. Hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi penagihan pajak dengan surat teguran pada tahun 2014 tergolong ke dalam kriteria sangat efektif.
3. Berikutnya pada tahun 2015 penagihan pajak dengan surat teguran hanya 73,11% sedangkan pada tahun 2016 penagihan pajak dengan surat teguran hanya 74,82%. Hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi penagihan pajak dengan surat teguran pada tahun 2015 dan 2016 tergolong ke dalam kriteria kurang efektif.

4.1.1.3 Gambaran Penerimaan Pajak pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016

Berdasarkan data Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama X, pada tabel berikut dapat dilihat data penerimaan pajak pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

Berdasarkan tabel 4.5 pada lampiran, berikut ini merupakan gambaran realisasi penerimaan pajak pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama X :

1. Pada tahun 2012 Penerimaan pajak yang tercapai pada tahun 2012 yaitu sebanyak 97,46% sadangkan pada tahun 2013 penerimaan pajak yang tercapai hanya 90,83%. Hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak pada tahun 2012 dan tahun 2013 tergolong ke dalam kriteria efektif.
2. Kemudian pada tahun 2014 penerimaan pajak yang tercapai hanya 106,9%. Hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak pada tahun 2014 tergolong ke dalam kriteria sangat efektif.
3. Berikutnya pada tahun 2015 penerimaan pajak hanya 78,23%. Hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak pada tahun 2012 tergolong ke dalam kriteria kurang efektif.
4. Pada tahun 2016 penerimaan pajak yang tercapai hanya 90,56%. Hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak pada tahun 2012 tergolong ke dalam kriteria efektif.

4.1.2 Analisis Verifikatif

4.1.2.1 Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran terhadap Penerimaan Pajak

Untuk mencari pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak, akan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda yang kemudian dilanjutkan dengan uji korelasi, koefisien determinasi dan pengujian hipotesis simultan dan parsial.

4.1.2.2 Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pembentukan model regresi, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi supaya model yang terbentuk memberikan estimasi yang tidak bias.

a. Uji Normalitas

Dari tabel 4.8 pada lampiran dapat dilihat nilai signifikansi (Asymp. Sig. (2-tailed)) dari uji *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,625 dan lebih besar dari 0,05. Karena nilai signifikan uji *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinieritas

Berdasarkan nilai VIF yang diperoleh seperti terlihat pada tabel 4.9 pada lampiran nilai *tolerance* kedua variabel bebas > 0,1 dan nilai VIF semua variabel < 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas pada data, sehingga model telah memenuhi salah satu syarat untuk melakukan pengujian regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Dari grafik *scatterplot* pada gambar 4.4 pada lampiran terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar merata baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedaktisitas pada model regresi.

d. Uji Autokorelasi

Dengan melakukan uji Durbin Watson, dapat diketahui apakah terdapat autokorelasi antarsesama urutan pengamatandari waktu ke waktu. Berdasarkan pengolahan SPSS 20.0 diperoleh nilai koefisien *Durbin Watson* (d) sebesar 1,123. Nilai tersebut berada di antara 1 dan 3 (Jonathan Sarwono:28) hal ini menunjukan bahwa tidak terdapat masalah gejala autokorelasi pada data.

4.1.2.3 Analisis Linear Berganda

Dengan menggunakan *software* SPSS versi 20.0, diperoleh hasil analisis regresi linier berganda. Dari perhitungan regresi yang telah diolah pada tabel 4.11, maka diperoleh persamaan regresi linier sebagai berikut:

b_0= 130,740	Artinya jika kedua variabel bebas (X) bernilai konstan (nol) maka Penerimaan Pajak (Y) akan bernilai sebesar 130,740 kali.
b_1=22,622	Artinya jika Pemeriksaan Pajak (X_1) meningkat sebesar satu miliar dan variabel lainnya konstan, maka Penerimaan Pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 22,622 kali.
b_2=15,705	Artinya jika Penagihan Pajak dengan Surat Teguran (X) meningkat sebesar satu miliar dan variabel lainnya konstan, maka Penerimaan Pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 15,705 kali.

4.1.2.4 Analisis Korelasi

Nilai R sebesar 0,998 pada output tabel 4.12 pada lampiran menunjukkan kekuatan hubungan kedua variabel independen (Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran) secara dengan Penerimaan Pajak. Jadi pada permasalahan yang sedang diteliti diketahui bahwa kedua variabel bebas secara bersama-sama memiliki hubungan yang kuat dengan Penerimaan Pajak.

Hubungan antara Pemeriksaan Pajak dengan Penerimaan Pajak adalah sebesar 0,227 termasuk dalam hubungan yang sangat lemah, sedangkan hubungan antara Penagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak adalah sebesar 0,868 termasuk dalam hubungan yang kuat.

4.1.2.5 Koefisien Determinasi

Berdasarkan tabel 4.14 pada lampiran, diperoleh informasi bahwa R-*square* sebesar 0,996 atau 99,6%. Nilai tersebut menunjukan bahwa Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak secara simultan dalam memberikan pengaruh terhadap variabel Penerimaan Pajak sebesar 99,6%. Sedangkan sisanya sebesar 100%-99,6% = 0,4% lainnya merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti seperti penagihan pajak dengan surat paksa, *tax amnesty,* kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, dan lain sebagainya.

Berdasarkan tabel 4.15 pada lampiran, dapat dilakukan perhitungan untuk memperoleh pengaruh parsial dari setiap variabel bebas sebagai berikut:

Pemeriksaan Pajak(X1)	0,515	X	0,227	=	0,117	Atau	11,7%
Penagihan Pajak(X2)	1,014	X	0,868	=	0,879	Atau	87,9%

Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui bahwa pengaruh terbesar 87,9% berasal dari variabel Penagihan Pajak sedangkan variabel Pemeriksaan Pajak hanya memberikan pengaruh sebesar sebesar 11,7%.

4.1.2.6 Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F)

Untuk menguji hipotesis di atas digunakan statistik uji-F yang diperoleh melalui tabel anova seperti yang disajikan pada tabel 4.16 pada lampiran

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} sebesar 254,497, nilai ini menjadi statistik uji yang akan dibandingkan dengan nilai F dari tabel dimanapada tabel F untuk α = 0,05 dan df_1:2 dan df_2:n-k-1 (5-2-1) = 2 maka diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 19,00. Karena F_{hitung}

(254,497) lebih besar dibanding F_{tabel} (19,000) maka pada tingkat kekeliruan 5% (α=0,05) diputuskan untuk menolak Ho dan menerima Ha. Artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Berdasarkan uji hipotesis tersebut dapat digambarkan daerah penolakan dan penerimaan Ho pada uji simultan pada gambar 4.5 pada lampiran.

Berdasarkan gambar 4.5 pada lampiran dapat dilihat bahwa F_{hitung} sebesar 254,497 berada pada daerah penolakan Ho, yang berarti bahwa Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

4.1.2.7 Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t)

Pengujian hipotesis parsial (uji-t) dilakukan untuk membuktikan apakah Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak dengan menggunakan program SPSS 20.0 yang ditunjukan pada tabel 4.17 pada lampiran.

Berdasarkan grafik 4.7 pada lampiran dapat dilihat bahwa nilai t-hitung (21,972) variabel Penagihan Pajak berada pada daerah penolakan H_0 atau daerah signifikan, hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai korelasi secara parsial variabel Pemeriksaan Pajak berada pada daerah penerimaan H_0 atau daerah berpengaruh signifikan, hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. Pemeriksaan Pajak memiliki hubungan dengan penerimaan pajak dengan arah positif. Nilai korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi diantara keduanya adalah searah, artinya semakin tinggi pemeriksaan pajak maka semakin besar penerimaan pajak, begitupun sebaliknya semakin rendah pemeriksaan pajak maka semakin kecil penerimaan pajak.

Hal ini sesuai dengan penelitian teori yang dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu (2013:247) menyatakan bahwa kegiatan pemeriksaan pajak ini dilakukan dengan produk hukumya berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebagai langkah untuk mencegah terjadinya kebocoran negara khususnya dalam penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Laura, dkk (2015) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Serta sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agus Arianto Toly dan Marisa Heryanto (2011) yang juga menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak.

Penjelasan yang dapat dikemukakan dari penelitian ini adalah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Besar kecilnya realisasi pemeriksaan pajak disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

4.2.2 Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran terhadap Penerimaan Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai korelasi secara parsial variabel Penagihan Pajak dengan Surat Teguran berada pada daerah penerimaan H_0 atau daerah berpengaruh signifikan, hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Penerimaan Pajak terhadap Surat Teguran terhadap Penerimaan Pajak. Penerimaan Pajak dengan Surat Teguran memiliki hubungan dengan penerimaan pajak dengan arah positif. Nilai korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi diantara keduanya adalah searah, artinya semakin tinggi penagihan pajak dengan surat teguran maka semakin besar penerimaan pajak, begitupun sebaliknya semakin rendah penagihan pajak dengan surat teguran pajak semakin kecil penerimaan pajak.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Soemarso S.R (2007:13) bahwa, kewajiban pajak muncul pada sisi Wajib Pajak karena undang-undang. Kewajiban ini harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, undang-undang memberikan hak kepada negara untuk memaksa. Tindakan memaksa

tercantum dalam pasal-pasal yang menyangkut penagihan. Tujuan dari dicantumkannya pasa-pasal penagihan adalah untuk memastikan bahwa penerimaan oleh pajak dapat dipenuhi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zakiah Syahab (2008) dan Diana Fitriani (2009), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Penjelasan yang dapat dikemukakan dari penelitian ini adalah penagihan pajak dengan surat teguran berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Namun besar kecilnya realisasi penagihan pajak dengan surat teguran disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

V. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sesuai rumusan masalah yang dicari yaitu sebagi berikut :

1. Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama X tahun 2012-2016. Hal ini menunjukkan ketika pemeriksaan pajak tinggi maka penerimaan pajak akan besar. Dalam penelitian ini, pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak adalah sebesar 11,7%.
2. Penagihan pajak dengan surat teguran berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama X tahun 2012-2016. Hal ini menunjukkan ketika penagihan pajak dengan surat teguran tinggi maka penerimaan pajak akan besar. Dalam penelitian ini, pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak adalah sebesar 87,9%. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh terbesar penerimaan pajak pada Kantor pelayanan Pajak Pratama X adalah Penagihan Pajak dengan Surat Teguran.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan diatas, maka peneliti mencoba memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan diantaranya sebagai berikut :

5.2.1 Saran Operasional

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka saran yang dapat peneliti berikan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Xr antara lain sebagai berikut:

1. Agar pemeriksaan pajak mencapai target maka pemeriksaan pajak yang dilakukan harus semakin maksimal dengan diimbangi oleh kesadaran wajib pajak untuk membayar tunggakan pajak. Selain itu harus lebih meningkatkan sosialisasi terhadap wajib pajak mengenai pemeriksaan.
2. Agar penagihan pajak dapat berjalan secara maksimal maka instansi harus lebih meningkatkan sosialisasi tentang manfaat pajak agar wajib pajak mau melunasi hutang pajaknya saat dilakukan penagihan. Selain itu Instansi harus melakukan penagihan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan dan harus menghitung hutang pajak wajib pajak dengan teliti agar tidak ada pengajuan keberatan atas jumlah tunggakan pajak yang diterbitkan.

5.2.2 Saran Akademik

1. Bagi Perkembangan Ilmu

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan masukan bagi perkembangan ilmu yaitu sebagai berikut :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang pemeriksaan pajak, penagihan pajak dengan surat teguran dan penerimaan pajak.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan masukan bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas periode sampel dan data penelitian agar dapat diketahui apakah hasilnya sama atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Supagat. 2013. *Statistik Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametik*. Kajarta: Salemba Empat.

Danang Sunyoto. 2013. *Metodelogi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama.

Diana Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Aditama.

Diaz Priantara. 2012. *Perpajakan Indonesia.* Jakarta: Mitra Wacana Medika.

Erly Suandy. 2016. *Perencanaan Pajak.* Jakarta: Salemba Empat.

Gujarati. 2012. *Dasar-dasar Ekonometrika.* Jakarta : Salemba Empat.

Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto. 2012. *Pengantar Ilmu Pajak : Kebijakan dan Implementasi Di Indonesia.* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Husein Umar. 2014. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis.* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

John Hutagaol. 2007. *Perpajakan Isu-isu Kontemporer.* Jakarta:Graha Ilmu.

Karianton Tampubolon. 2017. *Akuntansi Perpajakan dan Cara Menghadapi Pemeriksaan Pajak.* Jakarta: Indeks.

Rusjdi. 2007. *Penagihan dengan Surat Paksa.* Jakarta: Grasindo.

Siti Kurnia Rahayu. 2013. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Siti Resmi. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus.* Jakarta : Salemba Empat.

Soemarso S.R. 2007. *Perpajakan.* Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: PT Rineka Cipta.

Ulber Silalahi. 2015. *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*. Bandung: PT Refika Aditama.

Umi Narimawati. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media.

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat.

Wirawan B Ilyas dan Richard Burton. 2010. *Hukum Pajak.* Salemba Empat: Jakarta.

Jurnal

Agus Arianto Toly dan Marisa Herryanto. 2015. *Pengaruh Self Assesment System dan Pemeriksaan Pajak pada Penerimaan Pajak.* E-Journal Akuntansi Universitas Udayana. ISSN : 2302-8556.

Dina Fitriani dan Putu Mahardika Adi Saputra. 2009. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penerimaan Pajak.* Journal of Indonesian Applied Economics Vol.3 No.2, 135-149.

Laura Evaline Paranon, dkk. 2015. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kamtor Pelayanan Pajak Madya Malang).* Jurnal Administrasi Bisnis-Perpajakan (JAB). Vol.5 No.2 2015.

MarisaHeryanto dan Agus Arianto Toly. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surabaya Sawahan.* Tax & Accounting Review, Vol. 1 No.1. Hal 124-135.

Zakiah Syahab dan Arief Gisijanto. 2008. *Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak.* Jurnal Ekonomi dan Bisnis No.2 Volume 13, Agustus 2008.

Suryadi. 2006. *Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei Di Wilayah Jawa Timur.* Jurnal Keuangan Publik Vol.4, No.1 Hal 105-121.

Website

Agus Martowardojo. 2013. *Penerimaan Pajak 2012 Meleset dari Target*. (http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/01/08/02005642/Penerimaan.Pajak.2012.Meleset.dari.Target di akses 24 Maret 2017).

Bambang Brodjonegoro. 2014. *Target Penerimaan Pajak 2014 Lagi-lagi meleset.* (http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/10/30/145422626/Target.Penerimaan.Pajak.2014.Lagi-lagi.Meleset di akses 24 Maret 2017).

Said Abdullah. 2016. *Tewasnya Petugas Pajak Harus Jadi Pemicu Pemerintah Kejar Pengemplang Pajak.* (http://nasional.kompas.com/read/2016/04/13/18315321/read-brandzview.html diakses 24 Maret 2017).

Sofyan Basyir. 2014. *Kerja Sama E-Filing, BRI Berharap SPT Lebih Transparan.* (http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/03/24/1507550/kerja.sama.E-Filing.BRI.berharap.SPT.Lebih.Transparan di akses 24 Maret 2017).

Sri Mulyani. 2016. *Sri Mulyani Melarang Penarikan Pajak Secar semena-mena.* (http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/10/25/180000426/sri.mulyani.larang.penarikan.pajak.secara.semena-mena di akses 24 Maret 2017).

Lampiran

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak KPP Pratama X

Tahun	Target Penerimaan Pajak (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak(Rp)
2012	315.061.498.588	307.066.967.629
2013	365.567.912.279	332.030.488.209
2014	356.987.367.877	381.621.330.128
2015	570.061.094.997	445.930.493.885
2016	640.176.944.000	579.742.950.694

Sumber: KPP Pratama X

Tabel 1.2
Penagihan Pajak dengan Surat Teguran KPP Pratama X

Tahun	Target Penagihan Pajak	Realisasi Penagihan Pajak
2012	315.285.564	268.657.755
2013	315.285.564	260.808.286
2014	10.516.361.435	15.102.402.333
2015	16.723.583.042	12.226.181.664
2016	15.011.037.000	11.231.655.123

Sumber : KPP Pratama X

Tabel 1.3
Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama X

Tahun	**Target Pemeriksaan Pajak**	**Realisasi Pemeriksaan Pajak**
2012	7.545.721.515	9.139.153.458
2013	10.783.604.076	3.102.358.087
2014	10.154.275.506	8.882.244.047
2015	23.374.151.127	5.897.499.231
2016	14.374.475.000	7.404.856.717

Sumber : KPP Pratama X

Tabel 2.1
Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	**Kriteria**
Lebih dari 100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

Tabel 4.1
Data Target dan Realisasi Jumlah Pemeriksaan Pajak

Tahun	**Target Pemeriksaan Pajak (Rp)**	**Realisasi Pemeriksaan Pajak (Rp)**	**Presentase Realisasi Pemeriksaan Pajak**
2012	7.545.721.515	9.139.153.458	121,12%
2013	10.783.604.076	3.102.358.087	28,77%
2014	10.154.275.506	8.882.244.047	87,47%
2015	23.374.151.127	5.897.499.231	25,23%
2016	14.374.475.000	7.404.856.717	51,51%

Sumber : Data yang diolah

Tabel 4.3
Data Penyelesaian Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

Tahun	Target Pencairan Surat Teguran (Rp)	Realisasi Pencairan Surat Teguran (Rp)	Presentase Pencairan Surat Teguran
2012	315.285.564	268.657.755	85,21%
2013	315.285.564	260.808.286	82,72%
2014	10.516.361.435	15.102.402.333	143,61%
2015	16.723.583.042	12.226.181.664	73,11%
2016	15.011.037.000	11.231.655.123	74,82%

Sumber : Data yang diolah

Tabel 4.5
Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan Pajak (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak (Rp)	Presentase Realisasi Penerimaan Pajak
2012	315.061.498.588	307.066.967.629	97,46%
2013	365.567.912.279	332.030.488.209	90,83%
2014	356.987.367.877	381.621.330.128	106,9%
2015	570.061.094.997	445.930.493.885	78,23%
2016	640.167.944.000	579.742.950.694	90,56%

Sumber : Data yang diolah

Tabel 4.8
Uji Normalitas Model Regresi

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		5
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	6,82327800
Most Extreme Differences	Absolute	,336
	Positive	,229
	Negative	-,336
Kolmogorov-Smirnov Z		,751
Asymp. Sig. (2-tailed)		,625

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber : Hasil pengolahan SPSS

Tabel 4.9
Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pemeriksaan Pajak (X1)	,919	1,088
	Penagihan (X2)	,919	1,088

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)

Sumber : Hasil pengolahan (output) SPSS

Tabel 4.10
Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,998[a]	,996	,992	9,64957229	1,123

a. Predictors: (Constant), Penagihan (X2), Pemeriksaan Pajak (X1)

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)

Sumber : Hasil pengolahan SPSS

Tabel 4.11
Hasil Estimasi Persamaan Regresi

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	130,740	17,006		7,688	,017
	Pemeriksaan Pajak (X1)	22,622	2,028	,515	11,154	,008
	Penagihan (X2)	15,705	,715	1,014	21,972	,002

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)

Sumber : Hasil pengolahan (output) SPSS

Tabel 4.12
Koefisien Korelasi Berganda

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,998[a]	,996	,992	9,64957229	1,123

a. Predictors: (Constant), Penagihan (X2), Pemeriksaan Pajak (X1)

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)

Sumber : Hasil pengolahan SPSS

Tabel 4.13
Koefisien Korelasi Parsial

Correlations

		Penerimaan Pajak (Y)
Pemeriksaan Pajak (X1)	Pearson Correlation	,227
	Sig. (2-tailed)	,714
	N	5
Penagihan (X2)	Pearson Correlation	,868
	Sig. (2-tailed)	,057
	N	5

Sumber : Hasil pengolahan (output) SPSS

Tabel 4.14
Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,998[a]	,996	,992	9,64957229	1,123

a. Predictors: (Constant), Penagihan (X2), Pemeriksaan Pajak (X1)

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)

Sumber : Hasil pengolahan SPSS

Tabel 4.15
Pengaruh Parsial

Coefficients[a]

Model		Standardized Coefficients	Correlations
		Beta	Zero-order
1	Pemeriksaan Pajak (X1)	,515	,227
	Penagihan (X2)	1,014	,868

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)

Sumber : Hasil pengolahan SPSS

Tabel 4.16
Anova Untuk Pengujian Koefisien Regresi secara Simultan

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	47394,641	2	23697,320	254,497	,004[b]
	Residual	186,228	2	93,114		
	Total	47580,869	4			

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), Penagihan (X2), Pemeriksaan Pajak (X1)

Sumber : Hasil pengolahan SPSS

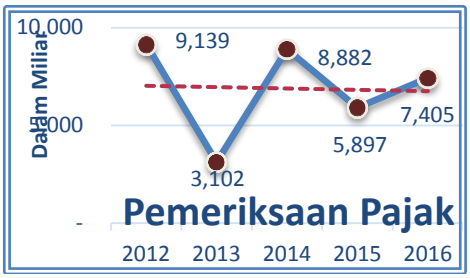
Tabel 4.17
Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	130,740	17,006		7,688	,017
	Pemeriksaan Pajak (X1)	22,622	2,028	,515	11,154	,008
	Penagihan (X2)	15,705	,715	1,014	21,972	,002

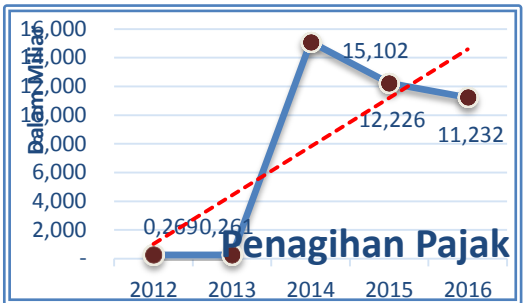
a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)

Sumber : Hasil pengolahan (output) SPSS



Sumber : Hasil pengolahan data sekunder

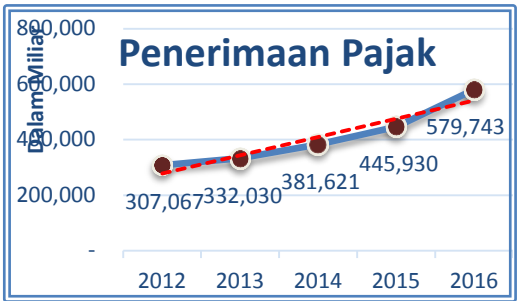
Gambar 4.1
Perkembangan Realisasi Pemeriksaan Pajak



Sumber : Hasil pengolahan data sekunder

Gambar 4.2

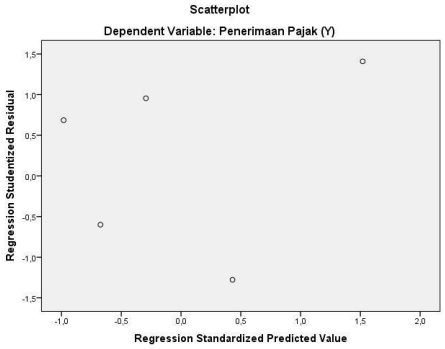
Perkembangan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran tahun 2012 sampai dengan tahun 2016



Sumber : Hasil pengolahan data sekunder

Gambar 4.3

Perkembangan Penerimaan Pajak pada Tahun



Sumber : Hasil pengolahan (output) SPSS

Gambar 4.4

Uji Heteroskedastisitas